



PRASYARAT MANAJEMEN DALAM MERESPON PELUANG OTONOMI DAERAH

Oleh: ¹Junindra Martua
(Fakultas Hukum Universitas Asahan)
Email: junindra@gmail.com

ABSTRAK

Campur tangan “Yang bijaksana” dalam merespon otonomi daerah perlu di lakukan agar pemerintahan daerah mampu bergandengan tangan dengan rakyatnya dalam membangun. Inilah yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat akan efektif jika dilakukan bersama diantara masyarakat dan aparat secara transparan dan bertanggung jawab. Untuk merespon peluang tersebut dibutuhkan aparatur dan manajemen yang professional sehingga pemerintah daerah mampu memahami segala potensi wilayah, dan aspirasi masyarakat untuk melaksanakan proses pembangunan, karenanya visi dan misi birokrasi dan aparatur pemerintah daerah perlu di restrukturisasi.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Manajemen

ABSTRACT

Intervention of "the wise" in responding to regional autonomy needs to be done so that regional governments are able to join hands with their people in developing. This is what is called community empowerment. Community empowerment will be effective if it is carried out together between the community and officials in a transparent and responsible manner. Responding to these opportunities requires professional apparatus and management so that local governments are able to understand all the potential of the region and the aspirations of the community to carry out the development process, therefore the vision and mission of the bureaucracy and local government officials need to be restructured.

Keywords: Local Government, Management.



A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya daerah mempunyai peluang besar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pembangunan melalui upaya menampung aspirasi masyarakat. Sebenarnya daerah dapat memulai lebih dahulu merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan yang nantinya dapat menjadi peraturan pemerintah melaksanakan undang-undang bahkan dapat menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sesuai dengan aspirasi dan potensi masyarakat lokal.

Dari segi yuridis dengan di terbitkannya UU Nomor 32 dan UU Nomor 33, daerah memiliki peluang besar untuk menjabarkannya dalam tataran operasional. Undang-undang tidak dapat dilaksanankan tanpa adanya peraturan pemerintah sampai dengan pedoman dan petunjuk pelaksanaan dalam melaksanakan.

Sedangkan otonomi daerah mengandung arti kebebasan masyarakat dan daerah untuk melaksanakan pembangunannya.

Prasyarat Manajemen (Junindra Martua) Citra Justicia, Vol. VII No.1 Januari 2008

Dengan demikian daerah mempunyai peluang untuk merumuskan langkah pembangunannya dalam peraturan pemerintah sejauh sejalan dengan hasil mufakat nasional yang dituangkan dalam Ketetapan MPR/DPR, serta tidak berbenturan dengan undang-undang lain yang berlaku.

Untuk itu diperlukan musyawarah untuk mufakat. Materi atau bahan dari musyawarah tersebut adalah satu konsep peraturan pemerintah daerah yang dibahas bersama, mana yang sesuai mana yang belum sesuai.

Proses globalisasi yang tidak dapat dibendung mensyaratkan adanya efisiensi, profesionalisme, dan daya saing

yang tinggi. Baths di antara wilayah menjadi semakin semu. Pertimbangan perbandingan (comparative advantage) digantikan dengan pertimbangan keuntungan (competitive advantage). Mana kegiatan yang lebih menguntungkan, lebih banyak memberikan manfaat itu yang akan menjadi pilihan. Satu upaya untuk menanggulangnya adalah dengan mempersiapkan masyarakat untuk lebih berdaya, mampu bersaing, berdaya saing tinggi dan profesional.

Daerah melalui aparatnya yang professional adalah yang paling memahami potensi wilayah, kemampuan, aspirasi masyarakat dan kemampuan (potensi) masyarakat dituntut untuk dapat melaksanakan misi pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya diperlukan pengawalan berupa pendampingan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman tersebut. Bagi masyarakat yang telah mampu peran Pemda sebagai pengawal, pendamping, dan fasilitator adalah cukup dengan mengawasi, mengarahkan, mengendalikan, dan bahkan cukup dengan memberikan himbauan.

Campur tangan "yang bijaksana" perlu kiranya di lakukan. Inilah yang disc but dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat akan efektif jika dilakukan bersama diantara masyarakat dan aparat secara transparan dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan semangat reformasi maka identifikasi potensi sangat diperlukan. Reformasi tidak harus menggantikan semuanya dengan yang serba barn. Reformasi adalah melanjutkan dan memantapkan hal-hal yang berhasil di capai. Menurunkan yang baik, menyempurnakan yang belum selesai, mengganti yang tidak sesuai, dan menambahkan yang kurang. Dengan



pemahaman ini maka identifikasi, evaluasi, dan formulasi kembali langkah-langkah yang telah di capai diharapkan mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Paradigma Baru Otonomi Daerah

Dengan latar belakang dan potensi yang ada saat ini daerah dapat melaksanakan peran pemberdayaan masyarakat lebih optimal. Pengalaman membangun

Prasyarat Manajemen (Junindra Martua) Citra Justicia, Vol. VII No.1 Januari 2008 telah menanam landasan pembangunan bagi masyarakat, dan masyarakat telah makin memahami hakikat pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut diperlukan perubahan sikap dan aparat birokrasi dan pendamping masyarakat. Perubahan visi tersebut antara adalah : "Pemahaman bahwa tugas Pemerintah bukan lagi sebagai pendorong ekonomi. Pelakunya adalah masyarakat, melalui badan-badan usahanya."

Adanya perubahan visi aparat birokrasi dari memberikan petunjuk, intruksi menjadi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan. Hal-hal yang, sudah dapat dilaksanakan oleh masyarakat perlu segera di serahkan pelaksanaannya kepada masyarakat. Yang belum dapat dilakukan masyarakat dilakukan oleh pemerintah dengan tetap berpedoman bahwa suatu saat harus dapat dan segera dilakukan sendiri oleh masyarakat.

Bersamaan dengan hal tersebut aparat harus mampu mengidentifikasi mana yang perlu diberdayakan, dimampukan dan dipersiapkan untuk berperan serta dalam pembangunan. Dalam lingkup pembangunan masyarakat pemda diharapkan mampu melakukan manajemen pembangunan daerah dengan fokus pengembangan kawasan. Potensi wilayah

diharapkan dapat dioptimalkan sehingga masyarakat dapat menjadi tuan di atas wilayahnya sendiri dalam satu entitas kawasan pembangunan, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip pembangunan nasional.

Walaupun perlu disadari sejalan dengan prinsip " globalisasi dan the End of the nation State" batas-batas wilayah menjadi semakin semu yang ada adalah pendayagunaan secara efisien dan profesional. Inilah nantinya yang selalu menjadi tantangan pemda, bagaimana pemda dapat membina masyarakat membangun, dalam wadah "networking" kerja sama (aliansi) dengan pemda lain dan sekitarnya.

Memahami bahwa dunia makin mengglobal, pembangunan nasional makin membuahkan hasil bagi masyarakat dan daerah. Masyarakat membangun makin meningkat kemampuannya. Kebutuhan masyarakat local tidak lagi mencukupi memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemampuan menghasilkan masyarakat daerah tidak mampu terserap oleh pasar setempat. Dengan demikian diperlukan pasar yang lebih luas, keluar daerah dan keluar negeri. Perkembangan ini perlu mendapatkan perhatian seksama diantara para pelaku pembangunan di daerah untuk mengoptimalkan langkah pembangunan berikutnya.

Untuk mewujudkan kenyataan tersebut, beberapa hal berikut kiranya perlu mendapatkan perhatian. Pertama, diperlukan reorientasi pemikiran dalam manajemen pembangunan daerah/wilayah dengan mempersiapkan masyarakat membangun sebagai pelaku pembangunan namun tetap berwawasan wilayah dan keutuhan Negara bangsa.

Kedua, restrukturisasi organisasi pemerintahan daerah menyesuaikan dengan tuntutan baru pembangunan. Pembangunan dilakukan oleh masyarakat, dan



aparatus birokrasi sebagai fasilitator dan motivator pembangunan.

Ketiga, adanya aliansi, atau melakukan kemitraan dengan masyarakat, sesama Pemda, pemerintah pusat, dan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah kawasan Negara lain yang potensial dijadikan mitra dalam pembangunan.

2. Kebijakan Ekonomi

Otonomi daerah merupakan keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Dengan peluang ini pemda harus makin proaktif untuk

Prasyarat Manajemen (Junindra Martua) Citra Justicia, Vol. VII No.1 Januari 2008 mengoptimalkan potensi daerah, memanfaatkan sumber daya yang ada, menjalin kerja sama dengan masyarakat di wilayahnya, diluar wilayahnya, bahkan bila mungkin ke luar negeri.

Berdasarkan pemikiran yang diuraikan di depan pemerintah daerah dapat memilih bermacam skenario kebijaksanaan. Kebijakan berorientasi pertumbuhan atau orientasi memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Dengan kemampuan ekonomi yang ada mungkin perlu di pilih satu skenario prioritas.

Sebagai contoh, program percontohan. Program percontohan bukan berarti mengabaikan wilayah lain yang tidak terpilih tetapi sebagai upaya pematangan langkah dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi. Keberhasilan dari skenario dapat menjadi lompatan kebijaksanaan di masa mendatang.

Langkah utama desentralisasi upaya memberikan kewenangan kepada masyarakat sebagai entitas ekonomi untuk merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan

melestarikan sendiri pembangunannya. Setiap entitas ekonomi dalam satu kawasan diharapkan mampu nyai kemampuan bersaing yang tinggi. Kegiatan ekonomi meningkat, kesejahteraan masyarakat meningkat dan kondisi ketertinggalan menjadi berkurang. Kawasan berkembang menjadi kawasan yang kompetitif, memberikan peluang kerja, dan mengurangi arus perpindahan masyarakat keluar wilayah. Jaringan ekonomi berkembang luas dari lingkup desa menjadi lingkup kecamatan dan tents hingga ke kabupaten, provinsi, nasional, bahkan hingga tingkat internasional, aktivitas ekonomi masyarakat

Campur tangan dalam pengertian membangun dapat dilakukan dalam tahap awal dan pelaksanaan kegiatan. Campur tangan harus dipandang sebagai penyediaan fasilitas yang memicu dan memacu berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat lokal dalam bentuk pendampingan (fasilitas, fasilitator).

Contoh keberhasilan skenario antara lain adalah pelaksanaan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang disempurnakan dengan Program Pembangunan Pra sarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) dan disempurnakan lagi dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Walaupun masih pada tataran mikro, pengalaman yang dapat dipetik adalah adanya sistem dan mekanisme pembangunan yang dilaksanakan dengan benar. Mekanisme tersebut antara lain mengandung hal-hal penting antara lain: desentralisasi kepada masyarakat, adanya aktivitas ekonomi produktif yang mengarah pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dalam lingkup kawasan ekonomi yang kompetitif, dan jaringan ekonomi luas sejak dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan bila



dimungkinkan kewilayah yang lebih luas lagi.

Dengan demikian kebijakan Prospek Keuangan Daerah adalah satu upaya pemerintah daerah untuk menghimpun dana guna pengelolaan pembangunan serta mandiri dan berkesinambungan. Untuk dapat mewujudkan harapan dari kebijakan Prospek ini perlu dilakukan tiga hal yaitu: reorientasi, restrukturisasi, dan Aliansi. Dalam setiap organisasi bisnis, biasanya manajemen ini untuk selamat dari setiap kesulitan. Hari ini manajemen organisasi publik, atau pemerintahan, atau birokrasi harus belajar dari sektor bisnis agar bisa bertahan mempertahankan fungsinya dan dapat mengkreasikan nilai kepada masyarakat.

3. Reorientasi

Arti harfiahnya adalah penemuan diri, Setiap organisasi dalam masa

Prasyarat Manajemen (Junindra Manua) Citra Justicia, Vol. VII No.1 Januari 2008 perubahan perlu untuk melihat kembali dimana posisinya, dan dalam kondisi yang berubah apakah is tetap mempertahankan arah organisasi, menyesuaikan, atau mengubahnya secara total.

Organisasi pemerintahan hari ini menghadapi fakta bahwa geoekonomi telah menggantikan geopolitik. Penggabungan kawasan tidak lagi ditentukan oleh faktor politik, melainkan bisnis. Diseluruh dunia telah terjadi integrasi kawasan atas dasar bisnis. Mobil Sangyong adalah produk buatan Korea Selatan, bermesin Mercedes-Benz dari Jerman, yang diproduksi di India, dan hari ini dipasarkan di Indonesia.

Negara dalam arti pemerintahan praktis "tidak diperlukan" untuk urusan seperti ini dan malangnya urusan bisnis selalu seperti ini, mereka tidak kenal bendera, yang mereka kenal hanya efisiensi dan produktivitas, dan untuk dapat mewujudkan harapan ini harus

ditempuh dengan empat langkah reorientasi.

Pertama, pemerintah harus menyana dari bahwa untuk membangun sebuah negara-bangsa yang kompetitif dan tidak kalah dalam persaingan global adalah membangun organisasi pemerintahan menjadi organisasi yang bisa dimana jemeni secara efektif dan merespon tuntutan globalisasi.

Kedua, tujuan pemerintah bukan lagi sebagai penggerak kehidupan negara-bangsa, tetapi menggantikan peran pemerintah sebagai penggerak perekonomian.

Ketiga, organisasi pemerintah harus mampu memainkan peran yang efektif dalam memberdayakan dua pelaku lain, yaitu organisasi bisnis dan organisasi nirlaba (termasuk partai politik dan LSM).

Keempat yang paling penting manajemen pemerintah harus belajar dari bisnis. Kenapa? Manajemen bisnis mengenal paling tidak empat akuntabilitas sosial. Ketiga akuntabilitas politis. Dan keempat akuntabilitas organisasional.

Pembelajaran penting dari organisasi pemerintah kepada organisasi bisnis adalah bahwa mereka perlu untuk menjadi adaptif terhadap setiap perubahan. Untuk menjadi adaptif, maka is harus mampu melaksanakan tugas-tugas manajemen dengan cepat, mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/kepemimpinan, dan evaluasi.

4. Restrukturisasi

Organisasi pemerintahan perlu di restrukturisasi mengikuti pola tantangan yang ban'. Praktik manajemen pemerintahan yang sebelumnya dipusatkan, didispersikan, Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan tidak lagi dilakukan dipusat. Pusat tinggal bekerja sebagai penyelaras.



Dalam organisasi pemerintahan ini berarti daerah memperoleh tugas untuk menyelenggarakan sendiri urusannya tanpa kemudian melepaskan diri dari pusat. Keterlepasan kepada pusat tidak selalu menjadi daerah menjadi lebih efektif. Pertama, jika masing-masing daerah memiliki keunggulan, maka mereka bisa saling melengkapi.

Restrukturisasi pertama dengan demikian adalah memetakan keunggulan masing-masing kawasan, dan mengembangkan kawasan tersebut secara khusus kepada keunggulannya.

Restrukturisasi kedua berkenaan langsung dengan organisasi pemerintahan. Di bagian sebelumnya telah dibahas tentang perlunya desentralisasi agar tidak terjadi pengeringan sumber daya intelektual di daerah. Dengan demikian diperlukan restrukturisasi kepegawaian, dan seterusnya. Sebagian besar gagasan di sini

Prasyarat Manajemen (Junindra Martua) Citra Justicia, Vol. VII No.1 Januari 2008 relatif sama dengan bagian restrukturisasi birokrasi

Restrukturisasi ketiga menyangkut masalah organisasi dipemerintahan pusat. Dalam konteks yang sangat spesifik, maka struktur politik formal yang dimaksud adalah komposisi dari teamwork kabinet yang akan datang. Dengan perubahan-perubahan hari ini dan tantangan kedepan, komposisi kabinet yang akan datang akan jauh lebih ramping dan efisien ketimbang hari ini.

5. Aliansi

Strategi ketiga adalah aliansi. Aliansi bukanlah penjumlahan atau penggabungan. Aliansi adalah penyatuan yang menghasilkan sinergi. Aliansi yang kita perlukan adalah antara pemerintah-bisnis-masyarakat/nirlaba, dan untuk bisa melahirkan sinergi maka aliansi harus di

bangun antara pemain yang sama-sama efisien.

Karena itu perlu di bangun pemerintahan yang efisien sebagai bagian dari aliansi untuk membangun Indonesia sebagai incorporated. Hari-hari lain kita bukan melihat aliansi, melainkan eksploitasi dan persengkokolan.

Pemerintah cenderung membuat kebijakan yang membuat pelaku ekonomi jantungan., karena penuh kejutan. Seakan tidak ada perencanaan jangka panjang yang jelas. Pelaku ekonomi, dari pada jantungan lebih baik kongkalikong dengan pejabat pemerintah.

Yang di perlukan justru pemerintah daerah memberdayakan seluruh potensi ekonomi kerakyatan yang ada di daerahnya, mulai si besar, si menengah, sampai si kecil, agar mereka menjadi mitra-mitra yang menarik pelaku bisnis dari kawasan ini.

Memberdayakan adalah kata kunci, karena dengan demikian tugas pemerintah bukan "mengganggu" melainkan memfasilitasi. Pemerintah daerah harus melihat bahwa bisnis adalah sebuah entitas yang khas, yang tidak boleh di obok-obok dengan politik.

Dengan berkembangnya potensi ekonomi kerakyatan di daerah, otomatis terjadi kesiapan dari masing-masing sektor: pemerintah (daerah), bisnis dan masyarakat (nir-laba) untuk beraliansi membangun kawasan kompetitif.

Jadi, trilogi : reorientasi-restrukturisasi-aliansi tadi mengacu kepada satu hal, bahwa organisasi pemerintah harus belajar dari organisasi bisnis. Tujuannya bukan menjadikan pemerintah sebagai businessman bahkan pemerintahpun tidak boleh berbisnis-melainkan membuat organisasi pemerintah bersifat pro-perubahan.

C. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan desentralisasi bukan hanya sebagai tuntutan formil yuridis, namun juga merupakan



kebutuhan riil Indonesia sebagai Negara sedang berkembang yang berhadapan dengan zaman yang serba efisien. Sentralisasi yang ketat selain hanya menimbulkan pemerintahan biaya tinggi, juga diyakini tidak lagi mampu menjawab tantangan zaman. Desentralisasi bukan lagi hanya sebagai trend, tetapi sudah menjadi kebutuhan.

2. Kebijakan desentralisasi di Indonesia masih perlu di sempurnakan, secara khusus dalam penetapan daerah otonom.
3. Prasyarat manajemen, artinya organisasi pemerintah harus memahami bahwa ia adalah organisasi yang harus dimanajementi agar bisa mengkreasikan nilai. Dalam strategi, ia perlu meta kukan reorientasi, restrukturisasi, dan aliansi. Dan yang terakhir, yang menjadi acuan sekarang adalah Prasyarat Manajemen (Junindra Manua) Citra Justicia, Vol. VII No.1 Januari 2008 management competence. Semua harus dimanajementi, tidak lagi cukup dikelola. Di manajementi artinya optimalisasi sumber daya harus di lakukan dengan keilmuan. Bukan saja oleh naluri dan pengalaman masa lalu.
4. Perlu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan control. Inovasi, pembelajaran, membangun Indonesia dengan daerah-daerah otonom yang memiliki kompetensi global, yang mampu untuk menjadi bagian aktif dalam kompetensi dan aliansi global.
5. Manajemen bukan saja masalah planning, organizing, leading/actuating, controlling,

namun juga inovasi, pro pasar, dan never-ending learning.

Manajemen adalah menemukan sumber daya dan mendayagunakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Manajemen adalah masalah ilmu dan praktik, bukan ideologi politik. Sampai hari ini, para pimpinan di pusat dan daerah lebih suka untuk mengurus masalah politik (dan kepentingan pribadi) dari pada memahami manajemen.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Faisal H., Perspektif Keutuhan Negara Bangsa, Gramedia, Jakarta 2000
-Otonomi Luas Dan Federalisme, sinar harapan, Jakarta 2000
- Mubyarto, Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Indonesia, Aditya Media, Yogyakarta, 1997
- Nugroho, Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi, Aditya Media, Yogyakarta 1999
-Pokok-Pokok Anggaran Pembangunan Tahun 2000, Embargo 20 januari 2000
- Sumodiningrat Gunawan, Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan, Penerbit inpac, Jakarta 1999
-Management Competence, Disektor Pemerintahan, Harian kompas, 10 april 2000
-Pembudayaan Masyarakat dan Jarring Pengaman Sosial, PT Gramedia, Jakarta 1999
-Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan, Rena Pariwara, Jakarta 1997